

**RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026**



**DISAMPAIKAN
SEBAGAI BAHAN RAPAT PEMBAHASAN**

DENGAN

**KOMISI V
DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

DALAM RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang sosial.

Adapun Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yaitu: mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyusunan rencana kerja dalam APBD Tahun 2026 Dinas Sosial Berpedoman pada dengan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD 2025 - 2029, yaitu **“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”**, khususnya dalam upaya mendukung Misi ke V yaitu **“Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan”**. Lebih spesifik lagi yaitu berkaitan dengan Program Prioritas yaitu : **“Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak”**.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa urusan sosial merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Dalam hal ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang menjadi kewenangan provinsi meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial;

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial;
5. Perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan SPM bidang Sosial tersebut maka saat ini, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan memiliki 6 UPTD yang terdiri dari 12 Panti Sosial yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Jumlah klien yang ada di dalam panti saat ini sebagai berikut:

NO	NAMA UPTD	JUMLAH KLIEN SAAT INI	KET
1	Panti Sosial Rehabilitasi Disabilitas Sensorik	25 Org	
2	Panti Sosial Rehabilitasi Disabilitas Gelandangan, Pengemis dan Orang dengan Gangguan Jiwa ODGJ	180 Org	
3	Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus		
	- Indralaya	25 Org	
	- Sekayu	30 Org	
	- Lubuk Linggau	30 Org	
	- Kayuagung	20 Org	
4	Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia		
	- Palembang	60 Org	
	- Ogan Ilir	80 Org	
	- Musi Rawas	30 Org	
	- Lubuk Linggau	30 Org	
5	Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum	25 Org	
6	Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Rawan Tuna Sosial	25 Org	
		560 Org	

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Alokasi Anggaran pada APBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 33.626.681.542,- (Tiga puluh tiga milyar enam

ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Adapun rincian belanja menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN BELANJA		PAGU ANGGARAN	KET
1	Belanja Operasi		33.827.506.542	
	a.	Belanja Pegawai	20.769.317.575	
	b.	Belanja Barang & Jasa	12.857.363.967	
2	Belanja Modal		0	
	a.	Belanja Moda Peralatan & Mesin	0	
	b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	
JUMLAH			44.376.686.512	

Adapun Anggaran Per Program Kegiatan adalah Sebagai berikut:

NO	URAIAN PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.721.171.542	
2	Program Pemberdayaan Sosial	300.000.000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	8.058.120.000	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosias	519.390.000	
5	Program Penanganan Bencana	709.000.000	
6	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	35.000.000	
7	Program Pemeliharaan TMP	284.000.000	
JUMLAH		33.626.681.542	

Dengan rencana kerja dan alokasi anggaran tersebut, diharapkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan, Pelayanan bagi klien di panti sosial lebih optimal, kesiapsiagaan bencana semakin kuat, serta program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif.

Oleh karena itu, kami berharap dukungan penuh dari Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menyetujui Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026 ini.

Terimakasih, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu.

Palembang, November 2026
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dra. Hj. Neng Muhaiba, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651112 199512 2 001

**Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
Dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2026**

Kode Rekening					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	KET
1					2	3	4	5
0	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	23.721.171.542	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		125.000.000	
1	06	01	1.02	0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	
1	06	01	1.04	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	
1	06	01	1.02		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		21.838.117.575	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20.769.317.575	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	793.800.000	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	275.000.000	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		62.000.000	
1	06	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12.000.000	
1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		408.000.000	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18.000.000	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30.000.000	
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	110.000.000	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.118.453.967	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	680.453.967	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	432.000.000	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		169.600.000	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	140.000.000	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20.000.000	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9.600.000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		300.000.000	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		300.000.000	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	06	02	1.02	0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	50.000.000	
1	06	02	1.02	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	150.000.000	
1	06	02	1.02	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	50.000.000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8.058.120.000	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Prosentase Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar nya di dalam panti	524.885.000	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	252.375.000	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	15.000.000	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	15.000.000	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	212.510.000	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	15.000.000	
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	15.000.000	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	1.520.775.000	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50.000.000	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	15.000.000	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	366.000.000	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	25.000.000	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	30.000.000	
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.034.775.000	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Prosentasi Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dalam panti	2.506.000.000	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.971.000.000	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70.000.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25.000.000	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	360.000.000	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	25.000.000	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	50.000.000	
1	06	04	1.03	0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	5.000.000	
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya di dalam panti	2.264.950.000	
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1.801.950.000	
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60.000.000	
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35.000.000	
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	288.000.000	
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	20.000.000	
1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	30.000.000	
1	06	04	1.04	0017	Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	30.000.000	
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		1.241.510.000	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	450.900.000	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	37.500.000	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	7.200.000	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	576.800.000	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	56.000.000	
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	32.500.000	
1	06	04	1.05	0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	80.610.000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		519.390.000	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		519.390.000	
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	36.360.000	
1	06	05	1.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	244.390.000	
1	06	05	1.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	188.640.000	
1	06	05	1.02	0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	50.000.000	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		35.000.000	
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		35.000.000	
1	06	03	1.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		709.000.000	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		709.000.000	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	200.000.000	
1	06	06	1.01	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	50.000.000	
1	06	06	1.01	0005	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	50.000.000	
1	06	06	1.01	0011	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	225.000.000	
1	06	06	1.01	0013	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	184.000.000	

	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		284.000.000	
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		284.000.000	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12.000.000	
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	72.000.000	
1	06	07	1.01	0004	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	200.000.000	
Jumlah							33.626.681.542	

Palembang, November 2025
 Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



Dra. Hj. Neng Muhaiba, M.M
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19651112 199512 2 001